

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KUALITAS
AUDITOR TERHADAP MANAJEMEN LABA**

(Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2011)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

SOFYAN EFFENDI

NIM.12030110151174

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sofyan Effendi

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110151174

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
DAN KUALITAS AUDITOR TERHADAP
MANAJEMEN LABA (Studi empiris
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2009 -2011)**

Pembimbing : Drs. Daljono, M.Si.,Akt

Semarang, 28 Mei 2013

Dosen Pembimbing

(Drs. Daljono, M.Si.,Akt.)

NIP. 196309151993031001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama : Sofyan Effendi

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110151174

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
DAN KUALITAS AUDITOR TERHADAP
MANAJEMEN LABA (Studi empiris
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2009 -2011)**

Telah dinyatakan lulus pada tanggal : 11 Juni 2013

Tim Penguji

1. Drs. Daljono, M.Si., Akt. (.....)
2. Darsono, S.E., MBA., Akt. (.....)
3. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sofyan Effendi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh *Corporate Governance* dan Kualitas Auditor terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2011)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan / atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, meniru atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 28 Mei 2013

Yang Membuat Pernyataan

(Sofyan Effendi)

NIM. 12030110151174

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.”
(Ir. Soekarno)

“Keberhasilan adalah tetesan-tetesan dari kerja keras, penderitaan, luka, pengorbanan dan kecemasan.”
(DR. 'Aidh al-Qarni)

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”
(Evelyn Underhill)

SKRIPSI INI
AKU PERSEMBAHKAN UNTUK:
BAPAK IBU YANG TELAH
BERKORBAN PERASAAN,
TENAGA DAN MATERI

KELUARGAKU YANG SELALU
MEMBERI SEMANGAT, MOTIVASI DAN
KASIH SAYANGNYA

LINDA NOVIANTI YANG TELAH
MEMBERIKAN PERASAAN CINTA DAN
PENGORABANANNYA

AKU SAYANG KALIAN SEMUA,
MAKASIH BANYAK ATAS SEGALA
BENTUK BANTUANNYA

ABSTRACT

Earnings management is the action taken by managers in manipulating financial statements are intended to benefit himself. It is considered as fraud committed by management as detrimental to many parties. This study aims to analyze and provide on empirical evidence of the influence of firm size, board composition, audit committees (audit committee activity and size), ownership (institutional and managerial) and auditor reputation on earnings management.

This study used a sample of banking companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) during the years 2009-2011 with a purposive sampling method and obtained as many as 69 samples. This study uses secondary data from company annual reports obtained from BEI. Data were analyzed using multiple linear regression.

The results of this study indicate that the size of the audit committee, managerial ownership and quality auditor significant effect on earnings management. While the size of the company, board composition, audit committee activity, and institutional ownership has no significant effect on earnings management.

Keywords: firm size, board composition, audit committees, shareholding, audit quality, and earnings management

ABSTRAKSI

Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer dalam memanipulasi laporan keuangan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini dianggap sebagai kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen karena merugikan banyak pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan, komposisi dewan komisaris, komite audit (aktivitas dan ukuran komite audit), kepemilikan saham (institusional dan manajerial) dan reputasi auditor terhadap manajemen laba.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2009-2011 dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 69 sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari BEI. Data kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit, kepemilikan saham manajerial dan kualitas auditor berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran perusahaan, komposisi dewan komisaris, aktivitas komite audit, dan kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Kata Kunci : ukuran perusahaan, komposisi dewan komisaris, komite audit, kepemilikan saham, kualitas auditor, dan manajemen laba

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Pengaruh *Corporate Governance* dan Kualitas Auditor terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2011)**”, penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap mahasiswa semester akhir dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada program sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi teknis maupun dari segi ilmiahnya yang semua itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penulis agar bisa menjadi lebih baik.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, Msi., Akt., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. Daljono, M.Si.,Akt Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu luangnya, saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Dr. Indira Januarti, SE., M.Si., Akt. Selaku dosen wali yang selalu memberi dorongan dan masukan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mohamad Syafruddin,M.Si.,Akt, selaku ketua jurusan akuntansi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Seluruh karyawan dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu dan mempermudah semua urusan yang penulis perlukan.
7. Orang tuaku, Suhadi dan Sri Wuryanti yang luar biasa. Terima kasih atas doa, perhatian, kesabaran, dukungan, dan ridhonya yang selalu diberikan. Semoga bisa membuat bapak dan ibu bangga.
8. Bulek Sus, Bulek Nanik, Bulek Tik dan Om Sigit, terima kasih banyak telah memberi dukungan dan doanya agar cepat lulus.
9. Adikku tercinta Kartika Dewi, terima kasih atas semangat dan motivasi yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

10. Kekasihku Linda Novianti, terima kasih telah menemani dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, kesabaran, kasih sayangnya, doa, perhatian dan bantuannya yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman mahasiswa program studi Akuntansi Reg. 2 angkatan 2010 Universitas Diponegoro Semarang, terutama Rendi, Bram, Budi, dan Bayu, makasih banyak atas segala bantuannya. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan kesuksesan yang telah kita capai.
12. Teman-teman bimbingan pak Daljono, terutama Taufik dan Wilza, makasih banyak atas masukan dan bantuannya.
13. Teman-teman kos, bapak/ibu Karsono, serta Mas Untung, makasih banyak atas doa dan bantuannya.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga semua bantuan, bimbingan, do'a, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Semarang, 28 Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Keagenan.....	14
2.1.2 <i>Good Corporate Governance</i>	17
2.1.2.1 Definisi <i>Good Corporate Governance</i>	17
2.1.2.2 Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	17
2.1.2.3 Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	18
2.1.2.4 Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	19
2.1.2.5 Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	21
2.1.3 Ukuran Perusahaan.....	23
2.1.4 Dewan Komisaris Independen.....	23
2.1.5 Komite Audit.....	26
2.1.6 Kepemilikan Institusional.....	28
2.1.7 Kepemilikan Manajerial.....	29
2.1.8 Kualitas Auditor.....	29
2.1.9 Manajemen Laba.....	31
2.1.9.1 Pengertian Manajemen Laba.....	31
2.1.9.2 Motivasi Manajemen Laba.....	33
2.1.9.3 Pola Manajemen Laba.....	36

2.1.9.4	Teknik Manajemen Laba.....	37
2.1.9.5	Metode Manajemen Laba.....	38
2.1.10	Penelitian Terdahulu.....	39
2.2	Kerangka Pemikiran.....	42
2.3	Perumusan Hipotesis.....	44
2.3.1	Ukuran Perusahaan dengan Manajemen Laba.....	44
2.3.2	Komposisi Dewan Komisaris dengan Manajemen Laba.....	46
2.3.3	Ukuran Komite Audit dengan Manajemen Laba.....	47
2.3.4	Aktivitas Komite Audit dengan Manajemen Laba.....	49
2.3.5	Kepemilikan Institusional dengan Manajemen Laba.....	50
2.3.6	Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen Laba.....	52
2.3.7	Kualitas Auditor dengan Manajemen Laba.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....		56
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	56
3.1.1	Variabel Dependen.....	56
3.1.2	Variabel Independen.....	58
3.1.2.1	Ukuran Perusahaan.....	58
3.1.2.2	Komposisi Dewan Komisaris.....	58
3.1.2.3	Ukuran Komite Audit.....	59
3.1.2.4	Aktivitas Komite Audit.....	59
3.1.2.5	Kepemilikan Institusional.....	59
3.1.2.6	Kepemilikan Manajerial.....	60
3.1.2.7	Kualitas Auditor.....	60
3.2	Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	61
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	61
3.4	Metode Analisis Data.....	62
3.4.1	Pengujian Asumsi Klasik.....	62
3.4.1.1	Uji Normalitas Data.....	62
3.4.1.2	Uji Heteroskedastisitas.....	63
3.4.1.3	Uji Multikolinearitas.....	64
3.4.1.4	Uji Autokorelasi.....	64
3.5	Pengujian Hipotesis.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		68
4.1	Statistik Deskriptif.....	68
4.2	Analisa Data.....	72
4.2.1	Uji Asumsi Klasik.....	72
4.2.1.1	Uji Normalitas.....	72
4.2.1.2	Uji Multikolinearitas.....	74
4.2.1.3	Uji Heteroskedastisitas.....	75
4.2.1.4	Uji Autokorelasi.....	77
4.2.2	Analisis Regresi.....	77
4.2.2.1	Overall.....	77
4.2.2.2	Koefisien Determinasi (R^2).....	78
4.2.2.3	Uji t.....	79

4.3	Pembahasan.....	82
4.3.1	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba.....	82
4.3.2	Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba.....	84
4.3.3	Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba.....	86
4.3.4	Pengaruh Aktivitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba.....	87
4.3.5	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba.....	88
4.3.6	Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba.....	90
4.3.7	Pengaruh Kualitas Auditor Terhadap Manajemen Laba.....	91
BAB V KESIMPULAN.....		93
5.1	Kesimpulan.....	93
5.2	Keterbatasan.....	93
5.3	Saran.....	94
5.4	Implikasi Penelitian Mendatang.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....		96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu..... 39
Tabel 4.1	Perincian Sampel Penelitian..... 68
Tabel 4.2	Daftar Sampel Perusahaan Perbankan..... 68
Tabel 4.3	<i>Descriptive Statistics</i> 69
Tabel 4.4	<i>Descriptive Statistics</i> setelah <i>outlier</i> 73
Tabel 4.5	Uji Normalitas Data.....73
Tabel 4.6	Uji Multikolinieritas..... 75
Tabel 4.7	Uji Heteroskedastisitas..... 75
Tabel 4.8	Uji Autokorelasi..... 77
Tabel 4.9	Uji F 78
Tabel 4.10	Koefisien Determinasi..... 78
Tabel 4.11	Uji t..... 79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan.....	100
Lampiran 2 Data Olah.....	101
Lampiran 3 Output SPSS.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan informasi ekonomi (keuangan) yang bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut. Tujuan pelaporan akuntansi adalah untuk mengomunikasikan semua informasi kepada pemakai laporan tersebut, dan membuatnya dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Bentuk laporan yang akan dengan mudah dipahami oleh pemakai adalah berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan oleh para pemakai laporan yang berkepentingan terhadap perusahaan baik pihak eksternal (pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan lain sebagainya) maupun pihak internal (manajemen). Laporan keuangan juga bisa menjadi bukti pertanggungjawaban manajemen terhadap segala sumber daya pemilik yang telah dikelolanya. Tujuan laporan keuangan adalah memberi informasi tentang kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan, dan arus kas kepada para pemakai laporan keuangan, untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan atas laporan keuangan tersebut. Maka dari itu laporan keuangan harus disajikan secara benar sesuai dengan standar yang berlaku.

Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan neraca, laporan laba-rugi, dan laporan perubahan ekuitas disusun dengan dasar akrual, sedangkan laporan arus kas disusun dengan dasar kas. Pemilihan dasar akrual karena dasar akrual lebih rasional dan akan lebih bisa mencerminkan kondisi keuangan perusahaan dengan sebenarnya, akan tetapi penggunaan dasar akrual akan memberikan keleluasan kepada manajemen dalam memilih metode akuntansi selama masih berdasar pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku saat ini. Metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh pihak manajemen untuk tujuan tertentu mengarah pada praktek manajemen laba (*earning management*).

Menurut Boediono (2005) salah satu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba. Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam *Statement of Accounting Financial Concepts* (SFAC) Nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif (FASB,1980). Laba bagi investor merupakan suatu indikator penting yang menunjukkan kinerja perusahaan, dimana nantinya investor akan menanamkan modalnya jika kinerja perusahaan itu bagus. Akan tetapi perhatian investor yang hanya terfokus pada laba membuatnya tidak memperhatikan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan angka laba tersebut. Ketergantungan investor terhadap informasi laba yang terdapat dalam laporan keuangan, turut mendorong manajer melakukan *earning management* untuk kepentingannya sendiri.

Nuryaman (2008) berpendapat manipulasi yang dikenal dengan *earning management* antara lain dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi

tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur, dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan keinginannya. Manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mempengaruhi laba yang dilaporkan dan memberikan manfaat ekonomi yang keliru kepada perusahaan, sehingga dalam jangka panjang hal ini akan sangat mengganggu bahkan membahayakan perusahaan.

Earning management sebagai intervensi dalam proses pelaporan keuangan eksternal memiliki tujuan untuk memperoleh beberapa kebutuhan pribadi. *Earning management* terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan, hal ini bertujuan untuk menyesatkan para *stakeholders* tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan, serta untuk mempengaruhi bonus yang akan didapatkan oleh manajemen. *Earning management* dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency cost*) yang dipicu dari adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola atau manajemen perusahaan (Herawaty, 2008).

Ada alasan mendasar yang membuat manajemen melakukan *earning management*. Harga pasar saham suatu perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh laba, risiko, dan spekulasi. Oleh karena itu, perusahaan dengan laba yang selalu mengalami kenaikan dari periode ke periode secara konsisten akan mengakibatkan risiko perusahaan ini mengalami penurunan lebih besar dibandingkan prosentase kenaikan laba. Hal ini yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan pengelolaan dan pengaturan laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang ditengarai

mampu menjadikan upaya rekayasa manajerial ini membudaya dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Pertama, aturan dan standar akuntansi, transparansi dan auditing yang masih lemah. Kedua, sistem pengawasan dan pengendalian sebuah perusahaan yang belum optimal. Ketiga, *moral hazard* pengelola perusahaan yang memang cenderung mendahulukan dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya (Sulistyanto, 2008).

Secara prinsip, *earning management* tidak menyalahi prinsip akuntansi berterima umum, namun adanya praktek ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan eksternal dan menghalangi kompetensi aliran modal di pasar modal. Manajemen laba penting untuk diketahui karena praktek ini dianggap dapat menurunkan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan, selain itu tindakan ini dapat merugikan investor karena mereka akan memperoleh informasi yang tidak sesuai mengenai posisi keuangan perusahaan. *Earning management* yang seringkali dilakukan dianggap telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh kalangan praktisi, akademisi akuntansi dan keuangan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dikarenakan *earning management* telah menjadi budaya perusahaan yang di praktikkan di seluruh dunia dan akibat yang ditimbulkan akan adanya praktik ini bukan hanya mampu menghancurkan tatanan perekonomian, tetapi juga tatanan etika dan moral.

Banyak terjadinya skandal keuangan diperusahaan publik yang memanipulasi laporan keuangannya disebabkan karena kurangnya pengawasan dan pengendalian sebuah perusahaan, hal tersebut bisa didapatkan pada

mekanisme *corporate governance*. Salah satu contoh kasusnya adalah manipulasi laporan keuangan oleh PT. Bank Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005). Adapun skandal keuangan di luar negeri antara lain: Enron, Merck, dan World.com (Cornet, *et al*, 2006).

Perbankan adalah suatu industri yang berbeda dengan industri yang lain seperti manufaktur, perdagangan, dan sebagainya, karena perbankan adalah industri yang sarat dengan berbagai regulasi. Dengan adanya regulasi didalam perbankan mengakibatkan hubungan keagenan industri ini berbeda dengan hubungan keagenan dalam perusahaan yang tidak teregulasi (Ciancenelli & Gonzales, 2000). Dengan adanya regulasi tersebut maka ada pihak lain yang terlibat dalam hubungan keagenan yaitu regulator dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia sehingga mengakibatkan masalah keagenan menjadi semakin kompleks (Rahmawati dkk, 2006). Selain itu, industri perbankan merupakan industri “kepercayaan”. Jika investor berkurang kepercayaan karena laporan keuangan yang bias dari tindakan manajemen laba, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang sering disebut dengan *rush*. Oleh karena itu, perlu suatu mekanisme untuk menimalkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah praktik *corporate governance*.

Corporate governance adalah sistem yang terdiri dari fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial melalui penerapan prinsip-prinsip dasar yang berterima umum (Warsono *et al*,

2009). *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pelaporan perusahaan yang lebih transparan bagi pengguna laporan keuangan. Prinsip-prinsip dasar *corporate governance* yang berterima umum untuk mencapai *good governance* adalah *transparency* (transparansi), *accountability* dan *responsibility* (pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban), *responsiveness* (ketanggapan), *independency* (independensi) dan *fairness* (keadilan). Prinsip *good governance* yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Dengan menerapkan *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan manipulasi manajer. Sehingga kinerja yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi perusahaan bersangkutan yang sebenarnya.

Selain *corporate governance*, mekanisme yang bisa digunakan untuk mengurangi *earning management* yang dilakukan manajemen adalah auditor independen. Independensi auditor dinilai dari lamanya penugasan auditor tersebut di perusahaan yang sama. Semakin lama auditor melakukan audit dalam suatu perusahaan, maka auditor dianggap tidak independen (Guna dan Herawaty, 2010). Independensi auditor juga menentukan kredibilitas laporan keuangan dan turut menentukan kualitas audit. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur

dengan proksi ukuran KAP, karena diasumsikan akan berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditornya. Auditor yang bekerja di KAP *Big Four* dianggap lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh serangkaian prosedur serta memiliki program audit yang lebih akurat dan efektif dibandingkan KAP yang bukan *Big Four* (Isnanta dalam Guna dan Herawaty, 2010). Dengan adanya pihak luar yang ikut memonitor jalannya perusahaan, diharapkan *earning management* yang dilakukan oleh manajemen akan semakin berkurang.

Terdapat banyak penelitian tentang mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba, serta penelitian tentang auditor independen dan kualitas auditor terhadap manajemen laba. Penelitian dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005) yang meneliti pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek *corporate governance* terhadap besarnya pengelolaan laba. Mekanisme *corporate governance* diukur dengan menggunakan tiga variabel, yaitu kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit. Penelitian dilakukan terhadap 144 perusahaan publik yang terdaftar di BEI periode non krisis yaitu tahun 1995-1996 dan 1999-2002. Hasilnya, ketiga variabel tersebut tidak terbukti signifikan berpengaruh terhadap besaran pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan, dengan kata lain tidak membatasi tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan yang dilakukan manajer.

Penelitian Ujiyantho dan Bambang (2007) meneliti mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba pada 30 perusahaan *go public* sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2000-2004.

Dimana pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diteliti adalah kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian Nasution dan Doddy (2007) meneliti mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba di Indonesia pada 20 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2000-2004, dimana variabel yang diteliti adalah komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan ukuran perusahaan secara serentak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian Nasution dan Doddy (2007) diatas mengambil industri perbankan sebagai sampel karena industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain, misal suatu bank harus memenuhi kriteria *Current Asset Ratio* (CAR) minimum. Salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak).

Penelitian Iqbal (2007) meneliti *corporate governance* (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, dan komite audit) sebagai alat pereda manajemen laba. Penelitian dilakukan pada 60 perusahaan dalam suatu sektor industri, manufaktur yang telah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode tahun 2000-2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serentak variabel tersebut berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan *go public* industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, namun secara individual hanya kepemilikan manajerial, dewan direksi, dan komite audit yang dapat digunakan sebagai alat untuk meredakan praktik manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional belum menjadi jaminan dapat meredakan manajemen laba.

Penelitian Nuryaman (2008) meneliti pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba. Populasi penelitian ini adalah perusahaan publik sektor manufaktur yang aktif selama tahun 2005, yaitu sebanyak 137 perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan kualitas audit dengan proksi spesialisasi industri KAP berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian Nofiani (2008) meneliti pengaruh mekanisme *good governance* terhadap manajemen laba di industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan pada 30 perusahaan perbankan pada tahun 2005-2006. Mekanisme *corporate governance* yang diteliti adalah komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan komite audit. Hasilnya menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian Sefiana (2009) meneliti pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan telah *go public* di BEI. Penelitian dilakukan pada 27 perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI selama periode 2007-2008. Mekanisme *corporate governance* yang diteliti adalah proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan keberadaan komite audit. Hasilnya menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.

Penelitian Guna dan Herawaty (2010) yang meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance*, independensi auditor, dan kualitas audit terhadap praktik manajemen laba. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 40 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2005-2008. Mekanisme *corporate governance* yang diteliti adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, keberadaan komite audit, dan komisaris independen. Hasilnya menunjukkan bahwa independensi auditor, kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, keberadaan komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Sedangkan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

1.2 Rumusan Masalah

Manajemen laba merupakan upaya manajemen dalam memodifikasi, menyembunyikan dan menunda informasi keuangan. Hal tersebut dianggap merugikan karena pihak manajemen dianggap memberikan informasi yang tidak

sesuai kepada pihak eksternal. Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi aktivitas manajemen laba, antara lain: dewan komisaris, komite audit, kepemilikan saham, dan auditor eksternal. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah aktivitas komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba?
6. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba?
7. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji *corporate governance* (komposisi dewan komisaris independen, keberadaan komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial); ukuran perusahaan; serta kualitas auditor terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak investor, calon investor, akademisi dan, perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber literatur atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada industri perbankan agar kepercayaan investor dapat terus meningkat serta menjadi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan diambil dengan melihat pengaruh dari penerapan *corporate governance* dalam perbankan Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab, terdiri dari Bab I sampai dengan Bab V. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Bab II merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan teori teori yang menjadi dasar acuan untuk menganalisis dalam penelitian. Bagian ini terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir

penelitian, dan pengembangan hipotesis. Bab III adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri atas variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis. Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan yang berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atau interpretasi hasil penelitian. Bab yang terakhir adalah bab V yang menjelaskan tentang simpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian ini, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan adalah hubungan antara *agent* (manajemen) dan *principal* (investor/pemilik perusahaan). Teori keagenan menyatakan bahwa jika ada pemisahan antara prinsipal sebagai pemilik dan agen sebagai manajer yang menjalankan perusahaan maka akan terjadi permasalahan agensi, karena masing-masing pihak akan selalu berusaha memaksimalkan fungsi utilitasnya.

Prespektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) seperti dikutip Ujiyanto dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara pihak *agent* (manajemen) dan pihak *principal* (investor). Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Agar hubungan ini dapat berjalan lancar maka pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari *agency theory*. Akan tetapi untuk mewujudkan kontrak yang tepat merupakan hal yang sulit, maka investor diwajibkan untuk memberi hak pengendalian residual kepada manajer (*residual control right*) yaitu hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya belum terlihat pada kontrak.

Menurut Eisenhardt dalam Ujijanto dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu : (1) manusia umumnya mementingkan dirinya sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetris informasi antara *principal* dan *agent*. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingannya sendiri. *Agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam memperoleh investasi, pinjaman maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat karena *principal* tidak dapat memonitor aktivitas *agent* sehari-hari untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan *principal*. *Principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent*, sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*.

Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan *agent* memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi

yang tidak diketahui *principal*. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dengan *agent*, mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan kinerja *agent*. Hal ini memicu *agent* untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya.

Dalam industri perbankan, aplikasi teori agensi menjadi unik karena industri ini berbeda dengan industri lain. Salah satunya adalah adanya regulasi yang sangat ketat, yang mengakibatkan penerapan teori agensi dalam akuntansi perbankan dapat berbeda dengan akuntansi untuk perusahaan bukan bank. Dengan adanya regulasi tersebut maka ada pihak lain yang terlibat dalam hubungan keagenan, yaitu regulator dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) yang berperan sebagai prinsipal dan bank-bank yang terdapat di Indonesia sebagai agennya. Bank Indonesia bertugas untuk mengawasi dan memonitoring kegiatan perbankan di Indonesia.

Tujuan utama dengan adanya teori keagenan tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. Teori keagenan juga berusaha menjawab masalah keagenan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang menjalin kerja sama, teori keagenan berusaha menyalurkan perbedaan kepentingan tersebut.

2.1.2 Good Corporate Governance

2.1.2.1 Definisi Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Berdasarkan definisi *good corporate governance* di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *good corporate governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

2.1.2.2 Manfaat Corporate Governance

Manfaat *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholder value* dan deviden.

2.1.2.3 Prinsip–Prinsip *Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKGCG) yang dibentuk tahun 1999 berdasarkan SK Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG). Pedoman tersebut beberapa kali disempurnakan, terbaru pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) sebagai pengganti KNKGCG. KNKG mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Lima prinsip dasar GCG dalam KNKG (2006) adalah sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil insentif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
3. Responsibilitas, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. Independensi, yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan, yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.2.4 Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Mekanisme dalam dalam pengawasan *corporate governance* menurut Iskander & Chamlou dalam Lastanti (2004) dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu *internal* dan *external mechanisms*.

Internal mechanisms adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris, dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan *external mechanisms* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar.

Ada beberapa mekanisme *corporate governance* yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba, diantaranya adalah dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan saham.

Dewan komisaris adalah pihak yang melakukan *monitoring* terhadap manajemen (Rahmawati, 2008). Dengan adanya dewan komisaris diharapkan nantinya manajemen akan menyusun laporan keuangan dengan lebih hati-hati dan akan melaporkannya dengan lebih akurat, sehingga dapat diperoleh suatu laporan yang berkualitas (Boediono, 2005).

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan. Komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi.

Adanya konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan akan membuat pemegang saham ada pada posisi yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki kendali terhadap manajemen untuk menuntut mereka melaporkan laporan keuangan secara akurat. Ini membuktikan bahwa mekanisme *corporate governance* mampu mengurangi adanya praktik manipulasi terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer.

2.1.2.5 Implementasi Prinsip *Corporate Governance* dalam Industri Perbankan

Industri perbankan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan ini membutuhkan adanya prinsip-prinsip dalam menjalankan kegiatan operasinya, hal ini dikarenakan industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat, khususnya pada kinerja keuangannya dibandingkan industri lain. Prinsip yang paling cocok diterapkan dalam pencapaian tujuan kinerja keuangan tersebut adalah prinsip *corporate governance*.

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Hal ini dikarenakan situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks, sehingga resiko kegiatan usaha perbankanpun kian beragam. Keadaan inilah yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan penerapan *corporate governance* dalam industri

perbankan. Selain untuk meningkatkan daya saing bank bank tersebut, penerapan *corporate governance* juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan *corporate governance* menjadi suatu kepercayaan mengingat industri perbankan adalah suatu industri kepercayaan.

Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip *corporate governance* antara lain Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum. Tujuan utama dari peraturan ini adalah berbagai upaya perwujudan *corporate governance* dengan mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh Direksi dan atau komisaris, maupun pemegang saham.

Peraturan lainnya yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan peningkatan *corporate governance* adalah Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. PBI tersebut mewajibkan bank untuk mendapatkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen resiko. Selain itu diatur juga mengenai kewenangan dan tanggung jawab direksi dan komisaris yang harus dilakukan terkait penerapan manajemen resiko tersebut.

2.1.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu bentuk pengukuran perusahaan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan tersebut. Indikator yang biasanya digunakan untuk melihat ukuran perusahaan adalah total aset, total penjualan, total karyawan, dan kapitalisasi pasar.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam melakukan investasi, karena perusahaan besar dianggap sudah mencapai kedewasaan yang mencerminkan bahwa perusahaan tersebut relatif stabil dan mampu menghasilkan laba. Perusahaan besar dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil dibanding perusahaan kecil. Alasannya karena perusahaan besar dianggap mempunyai beta sebagai pengukur sistematis yang lebih kecil (Jogiyanto dalam Tarigan, 2011). Selain itu perusahaan besar akan cenderung berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, hal itu dikarenakan perusahaan besar lebih diperhatikan oleh masyarakat (Nasution dan Setiawan, 2007).

2.1.4 Dewan Komisaris Independen

Menurut FCGI (2002), dewan komisaris merupakan salah satu unsur terpenting dari *corporate governance* yang memiliki tanggung jawab menjamin pelaksanaan strategi perusahaan berjalan sesuai tujuan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Sedangkan menurut Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah pihak yang bertugas dalam melakukan

pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Fama dan Jensen dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen. *Good corporate governance* akan tercapai jika dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi *monitoring* dengan baik. Karakteristik dewan komisaris independen dapat menjadi suatu mekanisme yang dapat meminimalisir manajemen laba, karena dengan fungsi pengawasan terhadap manajemen dapat memberikan kontribusi terciptanya laporan keuangan yang akurat.

Keberadaan komisaris independen diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan yang baik (*good corporate governance*), salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh Perusahaan tercatat adalah memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* menetapkan beberapa kriteria untuk menjadi komisaris independen pada perusahaan tercatat sebagai berikut :

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan.
2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan atau Komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan yang bersangkutan.
4. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.
5. Tidak menjadi patner atau *principal* di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
6. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan.
7. Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal dan UU serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

2.1.5 Komite Audit

Menurut FCGI komite audit adalah komite yang berfungsi memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Selain itu anggota komite audit perlu mempunyai suatu pedoman tentang tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk *Audit Committee Charter*. *Audit Committee Charter* adalah suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta komite audit yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh dewan komisaris yang dapat menjamin terciptanya kondisi pengawasan suatu perusahaan dengan baik.

Menurut FCGI (2002), pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan

Tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang perusahaan.

2. *Corporate Governance*

Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, etika bisnis serta melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap manajemen.

3. Pengawasan Perusahaan

Bertanggung jawab dalam pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Dalam menjaga kualitas laporan keuangan, prinsip independensi sangat diperlukan. Prinsip independensi dalam Komite Audit ditegaskan oleh Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep- 29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, yaitu:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
3. Tidak memiliki saham baik langsung ataupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan emiten.
5. Tidak bekerja sebagai komite audit pada perusahaan lain.

Selain itu, dalam keputusan tersebut BAPEPAM juga menghimbau bahwa setidaknya komite audit melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun atau kuartalan. Berdasarkan keputusan BEJ No. Kep-305/BEJ/07-2004, menyatakan keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan Tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Siregar dan Utama, 2005). Kepemilikan institusional berperan untuk memonitor kinerja manajemen dalam pengambilan keputusan agar manajemen perusahaan tidak bertindak sesuai keinginannya sendiri. Menurut Pozen (1994) investor institusi dapat dibedakan menjadi dua yaitu investor pasif dan aktif. Investor pasif tidak ingin terlalu terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial, sedangkan investor aktif ingin terlibat dalam keputusan manajerial. Keberadaan investor aktif inilah yang mampu menjadi alat monitoring manajemen, tak jarang pula kegiatan investor ini mampu meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.7 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afilisiannya (Susiana dan Hearawaty, 2005). Menurut teori keagenan, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda pula, seperti manajemen yang jadi pemegang saham dan manajemen yang tidak jadi pemegang saham.

Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria: (1) perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan pemilik (*owner-manager*); dan (2) perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik (*non owner-manager*). Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Boediono, 2005).

2.1.8 Kualitas Auditor

De Angelo dalam Meutia (2004) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Pelanggaran yang ditemukan oleh auditor mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan auditor untuk mengungkap pelanggaran tersebut. Motivasi untuk menemukan pelanggaran ini

tergantung kepada independensi auditor. Audit dapat dipandang berkualitas apabila auditor telah melakukan proses audit sesuai dengan standar auditing. Dengan digunakannya standar dalam proses audit, auditor diharapkan dapat menemukan kesalahan saji yang terdapat dalam laporan keuangan dan menjaga independensinya untuk tetap melaporkan kesalahan tersebut.

DeAngello dalam Siregar dan Utama (2006) mengemukakan bahwa kualitas audit meningkat dengan ukuran KAP karena KAP besar mempunyai kemampuan lebih untuk berspesialisasi dan berinovasi melalui teknologi sehingga meningkatkan kemungkinan KAP besar untuk menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi. Ia juga mengemukakan bahwa KAP besar akan mengalami kerugian yang lebih besar jika ia melakukan kesalahan dalam audit. Selain itu, KAP *Big Four* juga akan menjaga reputasi baiknya salah satunya adalah dengan cara menghindari tindakan-tindakan yang akan berdampak bagi nama baik KAP tersebut.

Oleh karena itu, reputasi auditor dapat menentukan kredibilitas laporan keuangan. Independensi yang dimiliki oleh auditor independen dan kualitas auditor akan berdampak terhadap pendeteksian manajemen laba. Berkaitan dengan independensi, AICPA memberikan prinsip-prinsip berikut sebagai panduan (Meutia, 2004):

1. Auditor dan perusahaan tidak boleh tergantung dalam hal keuangan terhadap klien

2. Auditor dan perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang akan mengganggu objektivitas mereka berkenaan dengan cara-cara yang mempengaruhi laporan keuangan.
3. Auditor dan perusahaan seharusnya tidak memiliki hubungan dengan klien yang akan mengganggu objektivitas auditor.

Selain itu, SEC (*Securities Exchange Committee*) sebagai badan yang juga berkepentingan terhadap auditor independen memberikan definisi lain terkait independensi. SEC memberikan empat prinsip dalam menentukan auditor yang independen. Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa independensi dapat terganggu apabila auditor: (1) memiliki konflik kepentingan dengan kliennya; (2) mengaudit pekerjaan mereka sendiri; (3) berfungsi baik sebagai manajer ataupun pekerja dari kliennya; (4) bertindak sebagai penasihat bagi kliennya. Ryan *et al* (dalam Meutia, 2004). Widyaningdyah (2001) menyebutkan terdapat dugaan bahwa auditor bereputasi baik dapat mendeteksi kemungkinan adanya *earning management* secara lebih dini, sehingga dapat memperkecil kemungkinan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba.

2.1.9 Manajemen Laba

2.1.9.1 Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba sebagai suatu proses pengambilan langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang berterima umum baik didalam maupun diluar batas *General Accepted Accounting Principle* (GAAP). Pengertian manajemen laba oleh Scoot (2000) adalah “*the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective*”. Dari definisi

tersebut dapat dijelaskan bahwa manajemen laba adalah suatu pilihan keputusan manajemen dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Selain itu, Healy dan Wahlen (1998) menyatakan bahwa manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan, yang bertujuan untuk menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan tersebut. Sedangkan menurut Setyawati dan Na'im (2000) manajemen laba adalah usaha campur tangan yang dilakukan oleh manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik manajemen laba akan mengurangi kredibilitas suatu laporan keuangan sebagai sarana untuk komunikasi antara manajer dengan pihak eksternal perusahaan.

Scout mengungkapkan terdapat dua cara untuk memahami manajemen laba. Pertama, sebagai perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan biaya politik. Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

2.1.9.2 Motivasi Manajemen Laba

Perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba tidak muncul dengan sendirinya, melainkan terdapat motivasi ekstrinsik dibalik motivasi tersebut. Telah banyak penelitian yang berusaha mengungkap motivasi dibalik perilaku tersebut dengan menggunakan data empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Healy (1985) serta Watts dan Zimmerman (1986) dalam Sulistiawan dkk (2011) terdapat beberapa hal yang memotivasi individu untuk melakukan manajemen laba, antara lain adalah:

1. Motivasi Bonus

Konsep ini menjelaskan bahwa bonus yang dijanjikan *principal* (pemilik) kepada *agent* (manajer) perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Manajer akan mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan sehingga bonus itu selalu didapatnya setiap tahun. Hal inilah yang mengakibatkan pemilik mengalami kerugian ganda, yaitu memperoleh informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah bonus untuk sesuatu yang tidak semestinya.

2. Motivasi Utang

Manajer seringkali melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor. Untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah besar, perilaku manajemen laba sering kali muncul untuk menampilkan performa baik dari laporan keuangannya. Selain untuk mendapatkan pinjaman, kasus seperti ini juga berlaku untuk menjaga perjanjian utang. Jika suatu

perusahaan mendapatkan dana dari kreditur, perusahaan berkewajiban menjaga rasio keuangannya agar berada pada batas bawah tertentu. Jika hal ini dilanggar, perjanjian utang dibatalkan.

3. Motivasi Pajak

Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan *go public* dan selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan. Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan yang belum *go public*. Perusahaan yang belum *go public* cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk bertindak kreatif melakukan tindakan manajemen laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan.

4. Motivasi Penjualan Saham

Motivasi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang akan *go public* ataupun sudah *go public*. Perusahaan yang akan *go public* akan melakukan penawaran saham perdananya ke publik atau lebih dikenal dengan istilah *Initial Public Offerings* (IPO) untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. Demikian juga dengan perusahaan yang sudah *go public*, untuk kelanjutan dan ekspansi usahanya, perusahaan akan menjual sahamnya ke publik baik melalui penawaran kedua, penawaran ketiga, dan seterusnya (*seasoned equity offerings-SEO*) melalui penjualan saham kepada pemilik lama (*right issue*), maupun melakukan akuisi perusahaan lain. Proses penjualan saham akan

direspons positif oleh pasar ketika perusahaan penerbit saham (emiten) dapat “menjual” kinerja yang baik. Salah satu ukuran kinerja adalah penyajian laba dalam laporan keuangan. Kondisi ini seringkali memotivasi manajer untuk berperilaku kreatif dengan menampilkan kinerja keuangan yang baik.

5. Motivasi Pergantian Direksi

Praktik ini seringkali terjadi pada sekitar periode pergantian direksi atau *Chief Executive Officer* (CEO). Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kerjanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat. Perilaku ini ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan laba yang cukup signifikan pada periode menjelang berakhirnya masa jabatan. Motivasi utama yang mendorong perilaku manajemen laba adalah untuk mendapatkan bonus yang maksimal pada akhir masa jabatannya.

6. Motivasi Politis

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan industri strategis perminyakan, gas, listrik, dan air. Demi menjaga agar tetap mendapatkan subsidi, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau kerjanya tidak terlalu baik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi visibilitas perusahaan sehingga tidak menarik perhatian pemerintah, media, atau konsumen yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya politis perusahaan. Rendahnya biaya politis akan menguntungkan manajemen.

2.1.9.3 Pola Manajemen Laba

Pola manajemen laba menurut Scoot (2000) dalam Rahmawati (2000) dapat dilakukan dengan cara:

1. *Taking a Bath*

Taking a bath terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan sehingga mengharuskan manajemen membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi.

2. *Income Minimazation*

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

3. *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang akan melakukan IPO agar memperoleh kepercayaan dari kreditur.

4. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

5. *Offsetting Extraordinary/Unusual Gains*

Teknis ini dilakukan dengan memindahkan efek-efek laba yang tidak biasa atau temporal yang berlawanan dengan tren laba.

6. *Aggressive Accounting Applications*

Teknik yang diartikan sebagai salah saji (*misstatement*) dan dipakai untuk membagi laba antar periode.

7. *Timing Revenue dan Expense Recognition*

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan *timing* suatu transaksi. Misalnya pengakuan prematur atas pendapatan.

2.1.9.4 Teknik Manajemen Laba

Teknik manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgment* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi biaya garansi, amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: merubah depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, menunda/mempercepat pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

2.1.9.5 Metode Manajemen Laba

Menurut Beneish (dalam Meutia, 2004) terdapat 3 pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba, antara lain:

1. Pendekatan yang mengkaji akrual agregat dan menggunakan model regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan dan yang tidak diharapkan.
2. Pendekatan yang menekankan pada akrual spesifik seperti cadangan hutang ragu-ragu, atau akrual pada sektor yang spesifik seperti tuntutan kerugian pada industri asuransi.
3. Pendekatan yang mengkaji ketidaksinambungan dalam pendistribusian pendapatan.

Sejauh ini hanya model berbasis *aggregate accrual* yang diterima secara umum sebagai model yang memberikan hasil yang paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba. Model *aggregate accrual* merupakan model yang sesuai dengan basis akuntansi yang sering digunakan (*accrual basis of accounting*) (Sulistyanto, 2008).

Sulistyanto (2008) menyatakan bahwa terdapat kelemahan pada akuntansi berbasis akrual, yaitu sifat *account* akrual yang rawan untuk direkayasa, dengan

atau tanpa harus melanggar prinsip akuntansi berterima umum. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dalam memperlakukan komponen akrual, terutama pendapatan dan biaya.

Murhadi (2009) menyatakan bahwa perusahaan seringkali menggunakan metode *discretionary accrual* untuk menilai manajemen laba. Adapun Sulistyanto (2008) mendefinisikan *discretionary accruals* sebagai komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi.

Secara empiris, yang dapat mengindikasikan suatu perusahaan melakukan manajemen laba adalah bila nilai *discretionary accruals* berupa nol, positif, atau negatif. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*), sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola penaikkan laba (*income increasing*) dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*) (Sulistyanto, 2008).

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil pengujian dari para penelitian terdahulu dapat dilihat dari Tabel 2.1 sebagai berikut :

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Agnes Utari Widyaningdyah (2001)	Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap <i>Earnings Management</i> pada Perusahaan <i>Go</i>	<i>Earning Management</i> , Reputasi auditor; Jumlah dewan direksi; <i>Leverage</i> ; dan Presentase	Hanya <i>leverage</i> yang berpengaruh signifikan terhadap <i>Earnings Management</i>

		<i>Public</i> di Indonesia	Saham yang ditawarkan kepada publik saat IPO	
2.	Deni Darmawati (2003)	<i>Corporate Governance</i> dan Manajemen Laba: Suatu Studi Empiris	Mekanisme GCG (pelaksanaan RUPS, kualitas komite audit, kualitas hubungan <i>stakeholders</i> , transparansi dan akuntabilitas, kepemilikan saham oleh investor institusional)	Hanya satu variabel dalam mekanisme GCG, yaitu kualitas hubungan perusahaan dengan <i>stakeholders</i> yang berhubungan dengan praktik manajemen laba.
3.	Wedari (2004)	Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit terhadap Manajemen Laba	Komite audit, proporsi dewan komisaris, akuntan publik <i>Big 4</i> , kepemilikan manajerial, dan institusional	Komite audit dan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan kepemilikan manajerial dan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
4.	Inten Meutia (2004)	Pengaruh Independensi Auditor terhadap Manajemen Laba untuk KAP <i>big 5</i> dan <i>non big 5</i>	Manajemen laba dan Kualitas Audit	Kualitas audit mempengaruhi manajemen laba.
5.	Sylvia Veronica N.P. Siregar dan Siddharta Utama (2006)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengelolaan Laba (<i>Earning Management</i>)	Kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, praktek <i>Corporate Governance</i> (ukuran KAP, proporsi dewan komisaris,	Kepemilikan keluarga dan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan kepemilikan institusional dan tiga variabel praktek

			keberadaan komite audit)	GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
6.	Nasution dan Setiawan (2007)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia	Komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan	Komposisi dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba sedangkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
7.	Ujiyantho dan Pramuka (2007)	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, dan kinerja Keuangan	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba; kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba; proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba; manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
8.	Rahmawati (2008)	Motivasi, Batasan, dan Peluang Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)	Asimetri informasi, Regulasi Perbankan tentang tingkat kesehatan dan kehati-hatian, Kualitas audit, Profitabilitas, dan Manajemen Laba	Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba; Asimetri informasi tidak signifikan terhadap manajemen laba; Asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap hubungan antara regulasi

				perbankan tentang tingkat kehati-hatian dan manajemen laba; kualitas audit tidak signifikan terhadap manajemen laba; profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
9.	Nuryaman (2008)	Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba	Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan mekanisme GCG (komposisi dewan komisaris dan spesialisasi industri KAP)	Konsentrasi kepemilikan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan komposisi dewan komisaris dan spesialisasi industri KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
10.	Sanjaya (2008)	Auditor Eksternal, Komite Audit, dan Manajemen Laba	Auditor eksternal, Komite audit, dan Manajemen laba	Kualitas auditor eksternal (<i>non big 4</i> atau <i>big 4</i>) berpengaruh negatif terhadap manajemen laba; komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

Sumber : Dikembangkan untuk penelitian ini

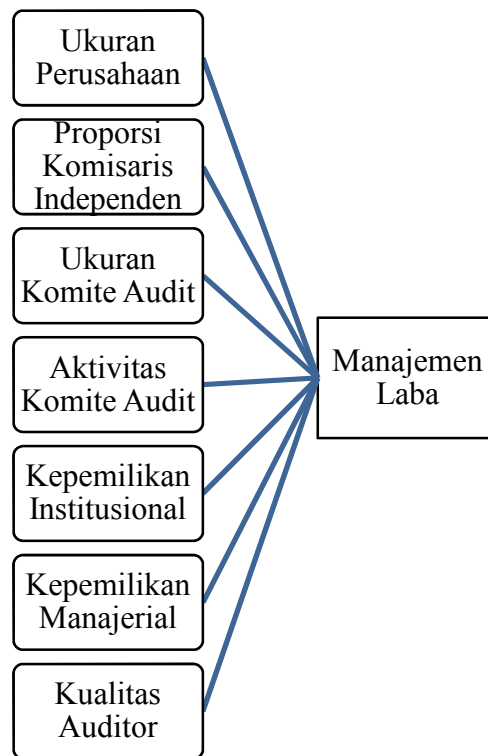
2.2 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajemen dapat mengakibatkan distorsi dalam alokasi dana. Industri perbankan merupakan industri “kepercayaan”, jadi jika laporan keuangan telah direkayasa maka

investor ataupun nasabah akan berkurang kepercayaannya dan mereka bisa saja melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan *rush*. Selain itu, perusahaan yang merekayasa labanya untuk jangka waktu yang panjang, bisa mengalami penurunan laba yang signifikan di masa mendatang. Manajemen laba yang seringkali dilakukan dianggap telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh kalangan praktisi, akademisi akuntansi dan keuangan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dikarenakan manajemen laba telah menjadi budaya perusahaan yang di praktikkan di seluruh dunia dan akibat yang ditimbulkan akan adanya praktik ini bukan hanya mampu menghancurkan tatanan perekonomian, tetapi juga tatanan etika dan moral.

Oleh karena itu, perlu suatu mekanisme yang bisa meminimalkan manajemen laba, salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah penerapan *corporate governance*. Penerapan *good corporate governance* khususnya ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional diduga mampu mempengaruhi praktik manajemen laba. Selain mekanisme *corporate governance*, auditor eksternal juga diharapkan bisa meminimalkan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Oleh karena itu, diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah mekanisme *corporate governance* dan kualitas auditor berpengaruh terhadap manajemen laba dan dapat meminimalkan manajemen laba tersebut.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Ukuran Perusahaan dengan Manajemen Laba

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan, ada berbagai macam proksi yang digunakan untuk ukuran perusahaan, seperti total aset, jumlah penjualannya dan kapitalisasi pasar. Ketiga variabel ini sering digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin luas pula

perusahaan dikenal masyarakat. Dari ketiga variabel ini, total aktiva lebih stabil dibandingkan dengan penjualan dan kapitalisasi pasar dalam mengukur perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar biasanya mempunyai kepentingan yang luas terhadap publik. Mereka lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga lebih berhati-hati dalam pelaporan keuangannya, sehingga berdampak pada laporan keuangannya yang lebih akurat.

Seperti yang dikutip oleh Nasution dan Setiawan (2007), penelitian yang dilakukan oleh Peasnell *et al.* (1998) menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan manajemen laba di Inggris. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa manajer yang memimpin perusahaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan kecil. Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat juga menunjukkan hasil yang sama, penelitian yang dilakukan oleh Chtorou *et al.* (2001) menemukan bahwa ukuran perusahaan di Amerika Serikat berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian di Indonesia yang menunjukkan hasil serupa adalah penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Utama (2005) yang menemukan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Makin besar ukuran perusahaan, makin kecil tindak manajemen labanya. Dalam penelitian ini diajukan hipotesis dengan rumusan sebagai berikut:

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.2 Komposisi Dewan Komisaris dengan Manajemen Laba

Dalam suatu perusahaan, dewan memegang peranan yang penting dalam penentuan strategi perusahaan. Indonesia merupakan negara yang menggunakan *two tier board system* dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, dimana setiap perusahaan yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk memiliki dua dewan, yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan komisaris adalah pihak yang melakukan fungsi monitoring terhadap kinerja manajemen, sedangkan dewan direksi adalah pihak yang melakukan fungsi operasional perusahaan (Rahmawati, 2008).

Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No.:KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No.: KEP-305/BEJ/07-2004, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Komisaris independen berjumlah sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris. Pentingnya komisaris independen adalah untuk mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba, sesuai tugas umum dewan komisaris yang melakukan pengawasan terhadap kualitas informasi yang terdapat pada laporan keuangan. Dewan yang terdiri dari dewan komisaris independen yang lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajemen. Hal ini karena semakin banyak Komisaris Independen maka pengawasan terhadap kebijakan manajemen juga akan bertambah banyak, dan manajemen akan lebih memperhatikan kepentingan

perusahaan daripada kepentingannya sendiri. Sehingga manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen juga akan berkurang.

Hasil penelitian Dechow (1996), Klein (2002), Peasnell *et al.* (2001), Chtourou *et al.* (2001), Pratana dan Mas'ud (2003), dan Xie *et al.* (2003) memberikan simpulan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Sehingga, jika anggota dewan komisaris meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya penggunaan *discretionary accrual* Corntt *et al.*, (dalam Nasution dan Setiawan, 2007). Dalam penelitian ini rumusan yang diajukan sebagai berikut:

H2 : Komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.3 Ukuran Komite Audit dengan Manajemen Laba

Menurut Kep-29/PM/2004, definisi komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit adalah penghubung antara pihak pemegang saham dan dewan komisaris dan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian (Rahmawati, 2008).

Berdasarkan keputusan BEJ No. Kep-305/BEJ/07-2004, menyatakan keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan Tercatat yang

sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan.

Tujuan dari keberadaan komite audit di perusahaan seperti yang diungkapkan oleh Susiana dan Herawaty (2007) dalam Guna dan Herawaty (2010) adalah: (1) Memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum serta disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan; (2) Memberikan kepastian bahwa pengendalian internal perusahaan telah memadai; (3) Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti kemungkinan penyimpangan material dalam bidang keuangan dan implikasi hukumnya; (4) Memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor eksternal yang akan melakukan audit di perusahaan.

Suryana (2005) meneliti hubungan antara keberadaan komite audit yang memenuhi syarat dan pengaruhnya terhadap *earning response coefficient*. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah *earning response coefficient* perusahaan yang telah memiliki komite audit yang memenuhi syarat lebih tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komite audit yang memenuhi syarat dalam perusahaan direspon lebih baik oleh pasar.

Xie *et al.* (2003) menguji efektifitas komite audit dalam mengurangi menguji efektifitas komite audit dalam mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa kesimpulan bahwa komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi

kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen. Wilopo (2004) juga menemukan hal yang serupa yaitu kehadiran komite audit dan dewan komisaris independen mampu mempengaruhi secara negatif praktik manajemen laba di perusahaan. Dalam penelitian ini diajukan hipotesis dengan rumusan sebagai berikut:

H3 : Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.4 Aktivitas Komite Audit

Seperti dijelaskan pada ukuran komite audit, komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Bapepam (2004) menghendaki bahwa komite audit mengadakan rapat dengan frekuensi yang sama dengan ketentuan minimal frekuensi rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Keberadaan komite audit bermanfaat dalam menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan bagi *stakeholder*, dan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen. Rapat komite audit yang secara rutin dilakukan akan meningkatkan fungsi *monitoring* terhadap manajemen. Dengan adanya pengawasan yang semakin ketat maka manajemen akan kehilangan kesempatan untuk melakukan perekayasaan laba pada laporan keuangan.

Xie *et al.* dalam Siregar dan Utama (2006) menemukan bahwa frekuensi pertemuan komite audit mempengaruhi besaran akrual diskresioner lancar. Sharma *et al.* dalam Putri (2010) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit dengan tingkat frekuensi pertemuan yang kecil akan cenderung menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba. Dalam penelitian ini diajukan hipotesis dengan rumusan sebagai berikut:

H4 : Aktivitas Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.3.5 Kepemilikan Institusional dengan Manajemen Laba

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Siregar dan Utama, 2005). Menurut teori keagenan, adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan, yaitu adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, sehingga dapat memicu terjadinya manajemen laba. Kepemilikan saham oleh investor institusional berperan untuk memonitor kinerja manajemen perusahaan dengan lebih efektif dan mempengaruhi manajer dalam pengambilan keputusan agar manajemen perusahaan tidak bertindak sesuai keinginannya sendiri (Iqbal, 2007).

Investor institusional dianggap memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan dengan investor individual, karena

mereka tidak mudah diperdaya oleh manajemen laba yang dilakukan manajemen. Suatu perusahaan yang memiliki kepemilikan institusi yang lebih besar dapat melakukan monitoring dengan lebih ketat, sehingga dapat mendorong manajemen untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan lebih transparan, termasuk dalam hal pengungkapan sebagai bentuk informasi dan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Kepemilikan institusi yang besar di dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan perusahaan kepada manajemen perusahaan. Ketatnya pengawasan tersebut meminimalkan kesalahan yang dilakukan perusahaan dan mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih transparan.

Menurut Lee *et al.* dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007) menyebutkan dua pendapat mengenai investor institusional, yaitu investor institusional sebagai pemilik sementara dan sebagai investor yang berpengalaman. Pendapat yang pertama, investor institusional sebagai pemilik sementara lebih memfokuskan pada laba sekarang yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika perusahaan menghasilkan laba yang tidak menguntungkan investor, maka investor dapat melikuidasi sahamnya. Pada umumnya investor institusional memiliki saham dengan jumlah besar, sehingga jika mereka melikuidasi sahamnya akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. Pendapat kedua memandang investor institusional sebagai investor yang berpengalaman (*sophisticated*). Menurut pendapat ini, investor lebih berfokus pada laba masa datang yang relatif besar dari laba sekarang. Investor

institusional akan melakukan monitoring secara efektif dan tidak akan mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan manajer.

Seperti yang dikutip oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007), penelitian yang dilakukan McConell dan Servaes (1990), Nesbitt (1994), Smith (1996), dan Del Guericco dan Hawkins (1999), menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku manajer. Dalam penelitian ini diajukan hipotesis dengan rumusan sebagai berikut:

H5 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.6 Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen Laba

Kepemilikan manajemen adalah saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Susiana dan Herawaty, 2005). Investor institusional dan manajemen memiliki insentif yang kuat untuk mendapatkan informasi pra-pengungkapan (*predisclosure information*) mengenai perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab fidusiarinya serta untuk meningkatkan kinerja portofolio mereka (Darmawati, 2003).

Menurut teori keagenan, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda pula, seperti manajemen yang jadi pemegang saham dan manajemen yang tidak jadi pemegang saham. Hal tersebut akan

mempengaruhi manajemen laba, karena kepemilikan saham oleh manajemen akan menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang akan diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Boediono dalam Ujijanto dan Pramuka, 2007).

Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Semakin besar proporsi saham oleh manajemen, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya sendiri sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba.

Warfield *et al.* (1995) menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan *discretionary accruals* sebagai ukuran dari manajemen laba, hasil serupa juga diperoleh Jensen dan Meckling (1976), serta Pratana dan Mas'ud (2003). Rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H6 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.7 Kualitas Auditor dengan Manajemen Laba

De Angelo (1981) dalam Meutia (2004) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Pelanggaran yang ditemukan oleh auditor mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan auditor untuk mengungkap pelanggaran tersebut. Motivasi untuk menemukan pelanggaran ini tergantung kepada independensi auditor. Audit dapat dipandang berkualitas apabila auditor telah melakukan proses audit sesuai dengan standar auditing. Dengan digunakannya standar dalam proses audit, auditor diharapkan dapat menemukan kesalahan saji yang terdapat dalam laporan keuangan dan menjaga independensinya untuk tetap melaporkan salah tersebut.

Audit adalah bentuk monitoring yang digunakan oleh perusahaan untuk menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) perusahaan dengan pemegang hutang (*bond holder*) dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Nilai audit timbul karena audit menurunkan pelaporan yang salah atas informasi akuntansi. Hasil audit ini dicerminkan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Hasil audit tidak bisa diamati secara langsung sehingga pengukuran variabel kalitas audit maupun kualitas auditor menjadi sulit untuk dioperasionalkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para peneliti terdahulu mencari pengganti dari indikator kualitas audit. Proksi yang sering dipakai untuk indikator dari kualitas audit adalah ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik), karena

diasumsikan akan berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditornya.

Auditor yang bekerja di KAP *Big Four* dianggap lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan auditor dari KAP *non-Big Four*. Jika auditor ini tidak dapat mempertahankan reputasinya, maka masyarakat tidak akan memberi kepercayaan kepada auditor *Big Four* sehingga auditor ini akan tiada dengan sendirinya. Hal ini terjadi pada KAP Arthur Andersen yang terlibat dalam kasus Enron (Sanjaya, 2008).

Meutia (2004) yang meneliti tentang hubungan antara kualitas audit dengan manajemen laba menemukan bahwa semakin tinggi kualitas auditor maka semakin rendah manajemen laba yang terjadi, hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2008) yang menyatakan bahwa KAP *Big Four* yang memiliki kualitas auditor yang tinggi di mata masyarakat dapat mencegah manajemen laba. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H7 : Kualitas Auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen penelitian ini adalah manajemen laba, yang diukur dengan proksi *discretionary accruals*. *Discretionary accruals* adalah suatu cara untuk mengurangi atau menambah pelaporan laba yang sulit dideteksi melalui manipulasi kebijaksanaan akuntansi yang bersangkutan atau berkaitan dengan akrual, misalnya dengan cara menaikkan biaya amortisasi dan depresiasi mencatat kewajiban yang besar atas jaminan produk (garansi), kontijensi, potongan harga dan mencatat persediaan yang telah usang.

Akrual adalah semua kewajiban yang bersifat operasional pada suatu tahun yang tidak berpengaruh terhadap arus kas. Perubahan piutang dan hutang merupakan akrual, juga perubahan persediaan. Biaya depresiasi juga merupakan akrual negatif. Akuntan memperhitungkan akrual untuk membandingkan biaya dan pendapatan melalui perlakuan transaksi yang berkaitan dengan laba bersih, akuntan dapat mengatur laba bersih sesuai dengan yang diharapkan.

Manajemen laba (DA) diproksikan oleh akrual kelolaan yang dideteksi dengan model akrual khusus Beaver dan Engel (1996). Model tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 \Delta NPA_{it+1} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Dimana:

CO_{it} : *loan charge offs* (pinjaman yang dihapus bukukan)

$LOAN_{it}$: *loans outstanding* (pinjaman yang beredar)

NPA_{it} : *nonperforming assets* (aktiva produktif yang bermasalah), terdiri dari aktiva produktif yang berdasarkan tingkat kolektivitasnya digolongkan menjadi (a) dalam perhatian khusus, (b) kurang lancar, (c) diragukan, dan (d) macet.

ΔNPA_{it+1} : selisih *nonperforming assets* t+1 dengan *nonperforming assets* t.

NDA_{it} : akrual non kelolaan.

Sesuai dengan definisinya bahwa :

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it} \quad (2)$$

DA_{it} adalah akrual kelolaan (*discretionary accruals*), TA_{it} adalah total akrual, dan NDA_{it} adalah akrual non kelolaan, maka:

$$TA_{it} = \beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 \Delta NPA_{it+1} + z_{it} \quad (3)$$

$$\text{Dimana } z_{it} = DA_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

Sebelum menentukan DA_{it} , harus mengurangkan terlebih dahulu variabel NDA_{it} dengan nilai buku ekuitas dan cadangan kerugian pinjaman. Dan untuk menentukan akrual total dengan menggunakan model Beaver and Angel (1996) ini maka digunakan total saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Berdasarkan dimensi waktu dan urutan waktu penelitian ini bersifat *crosssectional* dan *time series* atau disebut data panel (*data pooled*), karena selain mengambil sampel waktu dan kejadian pada suatu waktu tertentu juga mengambil sampel berdasar urutan waktu.

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan menurut pada penjualannya, total assetnya, jumlah karyawan dan kapitalisasi pasar. Untuk penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur dari ukuran perusahaan adalah total asset pada akhir tahun.

3.1.2.2 Komposisi Dewan Komisaris

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan antara para manajer dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberi nasehat kepada manajemen (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Indikator yang digunakan untuk penelitian ini adalah persentase jumlah komisaris independen dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris yang ada.

3.1.2.3 Ukuran Komite Audit

Keberadaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 anggota, seorang diantaranya komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite, sedangkan yang lain adalah pihak ekstern yang independen dan minimal salah seorang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur komite audit adalah dengan persentase anggota komite audit dari luar terhadap seluruh anggota komite audit.

3.1.2.4 Aktivitas Komite Audit

Aktivitas komite audit diproksikan oleh jumlah rapat, yang dihitung melalui jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam satu periode, berdasarkan data yang dicantumkan dalam laporan tahunan. Informasi terkait jumlah rapat yang dilakukan komite audit diperoleh dari laporan tahunan masing-masing perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia. Dalam peraturan BAPEPAM disebutkan bahwa komite audit wajib mengadakan pertemuan minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

3.1.2.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh institusi. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai

kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar.

3.1.2.6 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Boediono, 2005). Secara teoritis ketika kepemilikan saham oleh manajerial tinggi maka kemungkinan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer (manajemen laba) akan menurun. Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial merupakan variabel dummy. Jika perusahaan terdapat kepemilikan manajerial maka mendapat nilai 1 dan 0 sebaliknya.

3.1.2.7 Kualitas Auditor

Kualitas auditor sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur melalui proksi ukuran KAP tempat auditor bekerja, yang dibedakan menjadi KAP *Big Four* dan KAP *non-Big Four*. Kualitas audit diukur dengan skala nominal melalui variabel *dummy*. Angka 1 digunakan untuk mewakili perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan angka 0 digunakan untuk mewakili perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *non-Big Four*.

3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 – 2011 sebanyak 28 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana pengambilan perusahaan sampel dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1 Sudah *listing* pada tahun 2009.
- 2 Tidak mengalami *delisting* selama periode 2009-2011.
- 3 Memiliki laporan keuangan lengkap selama periode 2009 - 2011.
- 4 Mengalami laba selama periode 2009 – 2011.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang dipublikasikan pada periode 2009-2011 secara berturut-turut. Data didapat dari laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan Pojok BEI UNDIP.

3.4 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan metode penggabungan atau *pooling* data. Analisis

regresi berganda dapat menjelaskan pengaruh antara variabel terkait dengan beberapa variabel bebas. *Pooling* data atau data panel dilakukan dengan cara menjumlahkan perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria selama periode pengamatan. Keunggulan pengumpulan data secara *pooling* data adalah kemungkinan diperolehnya jumlah sampel yang lebih besar, yang diharapkan bisa meningkatkan *power of test* penelitian ini.

3.4.1 Pengujian Asumsi Klasik

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara teoritis akan menghasilkan nilai parameter model penduga yang valid bila terpenuhinya asumsi klasik regresi oleh model statistik yang teruji terlebih dahulu, meliputi:

3.4.1.1 Uji Normalitas Data

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak, nilai residualnya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual normal atau mendekati normal. Jika distribusi normal garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Salah satu cara untuk mendeteksi normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov satu arah. Hipotesis yang menyatakan model regresi tidak terdistribusi secara normal akan diuji dengan nilai z , apabila nilai z statistiknya tidak signifikan, maka suatu model regresi

disimpulkan terdistribusi secara normal. Uji kolomogorov smirnov dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat probabilitas dari kolomogorov smirnov z statistik. Jika probabilitas z statistik lebih besar dari 0,05 maka nilai residual terdistribusi secara normal, sedangkan jika probabilitas z statistik lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual dalam suatu model regresi tidak terdistribusi secara normal.

3.4.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastistas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastistas.

Salah satu cara untuk mendekati ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji *park*, dan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terkait (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Apabila nilai probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5 persen dan pada grafik scatterplot, titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heterokedastisitas (Ghozali, 2005).

3.4.1.3 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) jika nilai *tolarence value* $> 0,10$ dan $VIF < 10$ maka tidak terjadi Multikolinearitas.

Cara lain untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan melihat koefisien anantara variabel independen. Model regresi dikatakan tidak mengalami multikolinearitas bila korelasi anatar variabel independen lemah.

3.4.1.4 Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (*data time series*) atau rangkaian ruang (*cross sectional*). Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diamati menjadi tidak bias dan variannya tidak minimum sehingga tidak efisien (Ghozali, 2005).

Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi ini dilakukan uji Durbin Watson (DW). Setelah dilakukan regresi, kemudian dihitung nilai DW nya dengan jumlah sampel tertentu, diperoleh nilai kritis d_l (batas bawah) dan d_u (batas atas). Dalam tabel daftar distribusi Durbin Watson dengan berbagai nilai α Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi sebagai berikut :

Nilai $DW < d_l$ = ada autokorelasi positif

$d_l < \text{nilai DW} < d_u =$ tidak dapat disimpulkan

$d_u < \text{nilai DW} < 4-d_u =$ tidak ada autokorelasi

$4-d_u < \text{nilai DW} < 4-d_l =$ tidak dapat disimpulkan

Niali DW $> 4-d_l =$ ada autokorelasi negatif

3.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, aktivitas komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas auditor terhadap manajemen laba. Model yang diuji dalam penelitian ini bisa dinyatakan dalam persamaan regresi di bawah ini:

$$DA_{it} = \alpha + \beta_1 UP_{it} + \beta_2 KI_{it} + \beta_3 KMA_{it} + \beta_4 KMT_{it} + \beta_5 INST_{it} + \beta_6 KPMJ_{it} + \beta_7 KAU_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

α : konstanta

β : koefisien regresi

DA_{it} : *discretionary accruals*

UP_{it} : ukuran perusahaan yang diukur dari total asset pada tahun t

KI_{it} : persentase dewan komisaris independen terhadap total dewan komisaris pada tahun t

KMA_{it} : ukuran komite audit yang diukur dengan seluruh anggota komite audit pada tahun t

- KMT_{it} : jumlah rapat komite audit diukur dari jumlah yang dilakukan komite audi pada tahun t
- $INST_{it}$: kepemilikan institusional, yang diukur dari prosentase saham yang dimiliki oleh institusi pada tahun t
- $KPMJ_{it}$: kepemilikan manajerial yang diukur dari dari jumlah saham yang dimiliki oleh manajer, dewan direksi, dewan komisaris, dan karyawan pada tahun t. Jika terdapat kepemilikan saham oleh manajerial maka bernilai 1 jika tidak memiliki kepemilikan saham oleh manajerial maka bernilai 0.
- KAU_{it} : kualitas auditor, yang diukur dari ukuran KAP (*Big Four* atau *non-Big Four*) tempat auditor bekerja pada tahun t. Jika KAP tersebut berafiliasi dengan KAP *Big Four* maka bernilai 1 jika KAP tersebut tidak berafiliasi dengan KAP *Big Four* maka bernilai 0.
- ε_{it} : error

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian statistik yang dilakukan adalah :

1. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (UJi-t)

Pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel independen. Jika tingkat

probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Pengujian Koefisien Regresi Serentak (Uji-F)

Pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apakah tingkat probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 0 menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa informasi yang berada pada variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.